

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pemerintah membutuhkan penerimaan pajak yang pasti setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran/belanja negara. Penerimaan pajak dibagi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 *tentang* Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian keuangan. Contoh pajak pusat, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang digunakan untuk membayar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh pajak daerah yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, Bea Perolehan Hak atas

Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Kewajiban pajak harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. Salah satu pajak terbesar dalam pemungutan pajak di Indonesia adalah mengenai pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dipungut pada obyek pajak atas penghasilannya. Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 4 ayat 1 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak Penghasilan (PPh) akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia salah satunya, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut Peraturan Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri.

Adanya perbedaan kepentingan antara Wajib pajak dengan Pemerintah menjadikan faktor utama yang mempengaruhi adanya perencanaan pajak (*tax planning*). Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Sedangkan pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Hal ini dapat diputuskan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen dan pemerintah pun juga dapat memberikan opini positif karena perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Menurut Mardiasmo (2016:10) hambatan terhadap pemungutan pajak bersifat aktif yaitu *Tax avoidance*, merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang dan *Tax evasion* merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Menurut Pohan (2015:107-108) untuk menghitung PPh Pasal 21 terdapat 4 alternatif yang bisa digunakan yaitu Metode pertama adalah *net method*, yaitu metode perhitungan PPh pasal 21, dimana jumlah pajak yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Metode kedua adalah *gross method*, yaitu jumlah pajak yang terutang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Metode ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu perusahaan memberikan tunjangan pajak untuk meringankan pembayaran pajak penghasilan karyawan

dan karyawan tetap menanggung pajak dengan jumlah yang lebih kecil dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang disetor. Metode keempat adalah *gross up method*, yaitu tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebesar jumlah tertentu yang dihitung dengan menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan pajak yang dipotong dari karyawan.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa periklanan. Perusahaan yang berdomisili di Jakarta ini telah berdiri sejak Januari 2008. Pada awal karirnya, PT X hanya memiliki 5 karyawan yang terbagi menjadi dua divisi yaitu *marketing* dan *creative*. Pada awal berdirinya, PT X merupakan perusahaan jasa iklan yang menggunakan media iklan cetak seperti koran, majalah, dan televisi. Seiring dengan perkembangan teknologi, PT X mulai merambah media iklan berbasis internet seperti melalui social media dan website. Hingga saat ini, PT X mampu bertahan menjadi salah satu perusahaan jasa iklan yang patut dipertimbangkan dengan bukti kerjasamanya dengan perusahaan besar seperti BUMN. PT X telah memperkerjakan hingga sebanyak 23 karyawan dengan divisi *copy writing*, *messenger*, *art director*, *accounting*, *bussiness development*, *account executive*, *investor relation*. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 PT X memakai jasa konsultan yaitu HR Consulting dimana perhitungan awal menggunakan metode *net basis* dimana beban pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan sehingga jumlah PPh Badan menjadi lebih besar sehingga PT X memerlukan perencanaan perpajakan yang lebih baik

bagi kelangsungan usahanya. Berdasarkan latar belakang di atas, laporan PKL ini akan membahas mengenai “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X”.

1.2. Ruang Lingkup

Dalam praktik kerja lapangan ini yang dilaksanakan mulai dari tanggal 20 Desember 2017 sampai 20 Maret 2018, laporan PKL ini membahas mengenai pelaporan dan penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2017 bagi pegawai tetap dengan menggunakan empat metode perencanaan pajak yaitu *Net Basis*, *Gross*, *Tunjangan Pajak* dan *Gross Up* di PT X.

1.3 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

1.3.1 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan dari praktik kerja lapangan ini, yaitu:

- a. Untuk mengimplementasikan kemampuan praktik yang diperoleh selama perkuliahan.
- b. Memperoleh pengalaman dan menambah wawasan dalam praktik di dunia kerja.

1.3.2 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat dari praktik kerja lapangan ini, yaitu:

1. Bagi mahasiswa
 - a. Sebagai syarat kelulusan Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Bisnis Katolik Widya Mandala Surabaya.

- b. Untuk mengimplementasikan kemampuan praktik yang diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Memperoleh pengalaman dan menambah wawasan dalam praktik di dunia kerja.
- 2. Bagi HR Consulting
 - a. Memperoleh kesempatan menjalin relasi yang baik dengan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam keberlangsungan kerja sama tempat magang.
 - b. Mempermudah HR Consulting dalam mencari pegawai baru dengan merekrut mahasiswa magang.
- 3. Bagi Perusahaan
 - a. Menjalinkan hubungan kemitraan yang baik antara tempat magang dengan perusahaan yang dianalisis.
 - b. Mendapatkan rekomendasi yang baik mengenai perencanaan pajak penghasilan pasal 21 untuk keberlangsungan usahanya.